



SALINAN

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 133 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 45 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 125 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 45);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB II PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
 - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
 - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
 - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 133

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



YANA ROSMIANA, S.H.M.H

Pembina Tk.I

NIP. 196901011999012001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
BANDUNG
NOMOR 133 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN CIWIDEY KABUPATEN
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN CIWIDEY
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Ciwidey ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah Kecamatan Ciwidey.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey tahun 2025 adalah dokumen perencanaan perubahan dari rencana kerja murni yang memuat evaluasi kerja Kecamatan Ciwidey pada tahun 2025 sampai dengan bulan Juni 2025 atau Triwulan II, disusun sebagai panduan pelaksanaan anggaran, program, kegiatan dan sub kegiatan perubahan pada tahun 2025. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey tahun 2025 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025 dan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Ciwidey tahun 2021-2026. Kami menyadari dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 ini disusun belum optimal dan masih banyak kekurangan. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak akan diterima dengan senang hati untuk perbaikan penyusunan di masa yang akan datang.

Akhir kata, kami berharap semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam menjalankan amanah dan tugas ini. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kecamatan Ciwidey.

Ciwidey, Juni 2025

CAMAT CIWIDEY

NARDI SUNARDI, SE.,M.Si

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700705 199503 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I.....	PENDAHULUAN
1	
1.1.	Latar Belakang 1
1.2.	Landasan Hukum 2
1.3	Maksud dan Tujuan..... 5
1.4	Sistematika Penulisan 5
BAB II EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU	7
2.1.	Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra 7
2.2.	Analisis Kinerja Pelayanan.....30
2.3	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....31
2.4	Review terhadap Rancangan RKPD36
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat47
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	49
3.1.	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... Error! Bookmark not defined.
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja52
3.2.	Program dan Kegiatan..... Error! Bookmark not defined.
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	86
BAB V PENUTUP	99
5.1.	Catatan Penting99

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 disusun sebagai bentuk tindak lanjut atas dinamika dan perkembangan yang terjadi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Perubahan ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi capaian kinerja serta kebutuhan masyarakat Kecamatan Ciwidey.

Dalam penyusunan perubahan Renja ini, kami berpedoman pada arahan dan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bandung, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Perubahan Renja ini bertujuan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran, serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan yang ada di masyarakat. Proses revisi Renja ini melibatkan berbagai tahapan, mulai dari evaluasi terhadap kinerja tahun sebelumnya, identifikasi isu-isu strategis, analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), hingga perumusan program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan situasi terkini. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, baik dari jajaran pemerintah kecamatan, masyarakat, hingga para mitra pembangunan, menjadi kunci dalam penyusunan dokumen perubahan ini.

Dengan adanya perubahan Renja Tahun 2025 ini, diharapkan Kecamatan Ciwidey dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan. Kami menyadari bahwa perubahan ini memerlukan komitmen dan kerja sama dari semua pihak untuk mencapai hasil yang optimal.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatar belakangi penyusunan Perubahan Renja Tahun 2025 Kecamatan Ciwidey adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
12. Keputusan Menteri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
13. Keputusan Menteri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodeikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 64);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 2025(Lembar daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025;
21. Peraturan Daerah Kab. Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah Di Kabupaten Bandung
23. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Kedudukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 120 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung;
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 76);
26. Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2025 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025;
27. Peraturan Bupati Bandung Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026;
28. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137/KEP.769-TAPEM/2023 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 dimaksudkan untuk menyesuaikan arah dan strategi pembangunan kecamatan dengan kondisi dan kebutuhan aktual yang berkembang. Hal ini meliputi penyesuaian terhadap kebijakan terbaru, dinamika sosial dan ekonomi, serta evaluasi atas capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program sebelumnya. Dokumen perubahan ini diharapkan mampu memberikan kerangka kerja yang lebih relevan dan adaptif guna mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Ciwidey adalah:

1. **Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Menyusun kembali program dan kegiatan agar lebih terfokus, terukur, dan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditentukan, sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

2. **Menyesuaikan dengan Kebijakan dan Prioritas Terbaru**

Memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bandung dan kebijakan nasional yang terbaru, serta dapat menyesuaikan dengan perkembangan regulasi dan arahan strategis.

3. **Memperbaiki Capaian Kinerja dan Outcome Pembangunan**

Menyesuaikan target dan indikator kinerja agar lebih realistis dan terukur, sehingga dapat meningkatkan capaian kinerja dan outcome pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan.

4. **Mengantisipasi dan Mengatasi Tantangan serta Hambatan**

Mengidentifikasi dan merespons berbagai tantangan dan hambatan yang mungkin muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi yang efektif.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Ciwidey Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Ciwidey, agar substansi pada Bab-bab berikutnya

dapat dipahami dengan baik.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2025

Menggambarkan kajian terhadap hasil evaluasi Renja Kecamatan Ciwidey tahun berkenaan, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas / fungsi, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program/kegiatan.

BAB III Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan

Membahas tentang telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi, Tujuan dan sasaran Renja Kecamatan Ciwidey serta Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan

Membahas tentang rencana kerja pada Tahun 2025 serta pendanaan yang disediakan untuk menjalankan rencana kerja tersebut.

BAB V Penutup.

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DAN CAPAIAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 Kecamatan Ciwidey merupakan tahapan penting dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai sejauh mana program dan kegiatan yang telah direncanakan dan dilaksanakan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan serta memberikan dampak positif bagi masyarakat Kecamatan Ciwidey. Namun, dalam pelaksanaan Renja 2025, beberapa tantangan masih perlu mendapatkan perhatian serius. Salah satunya adalah penyerapan anggaran yang belum optimal di beberapa sektor, yang disebabkan oleh hambatan administratif dan koordinasi antar instansi terkait. Selain itu, terdapat pula isu terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia dan kapasitas teknis dalam melaksanakan program-program yang lebih kompleks. Evaluasi ini menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas aparatur serta penguatan koordinasi lintas sektor untuk memastikan bahwa seluruh program dapat berjalan sesuai dengan rencana dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Kecamatan Ciwidey.

Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Ciwidey perkiraan capaian sampai triwulan II (2025) dilakukan dengan mengacu pada APBD Tahun 2025 yang sedang berjalan dan dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Tahun 2025, Sampai Triwulan II. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2025 dan realisasi Renstra disusun dengan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan/atau realisasi APBD.

Pada Tahun 2025 Kecamatan Ciwidey melaksanakan 6

(enam) program dengan 46 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan didalamnya dan anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.681.532.056,00 untuk melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) beserta perubahannya (DPPA-SKPD). Program/kegiatan tersebut telah berhasil dilaksanakan sesuai rencana anggaran kas dengan realisasi capaian kinerja fisik mencapai 36,60% dengan kinerja keuangan (realisasi anggaran) mencapai 46,77% atau Rp. 2.202.021.820,00 Berdasarkan hasil pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan maka realisasi program/kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut :

**Tabel 2. 1 Evaluasi Hasil Terhadap Renja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah KECAMATAN CIWIDEY Kabupaten Bandung 2025**

No	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)Sub Kegiatan (Output)	Target Renstra Perangkat Daerah sampai dengan tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat at Daerah sampai dengan Renja Perangkat at Daerah Tahun 2024		Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun Berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun n- 1 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun....)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah s/d tahun 2025 (%)	
				K	RP	K	RP	K	RP	I		II		K	RP	K	RP	K	RP	K	RP
1	2	3	4	5		6		7		8		9		12		13		14		15	
	7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
	7.01	KECAMATAN																			
1	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akip	Rp 24.520.117.076,00	-	Rp -	77,00 Point	Rp 4.508.271.017,00	-	Rp 1.153.010.269,00		Rp 1.049.011.551,00	-	Rp 2.202.021.820,00	-	25,58 %	-	Rp 1.153.010.269,00	-	4,70 %	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan dokumen perencanaan dan evaluasi	Rp 73.576.254,00	-	Rp -	100,00 %	Rp 68.199.926,00	-	Rp 680.000,00	-	Rp 3.535.000,00	-	Rp 4.215.000,00	-	1,00 %	-	Rp 680.000,00	-	0,92 %	
	7.01.01.2.01.001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 10.691.190,00	-	Rp -	2,00 Dokumen	Rp 2.353.095,00	1,00 Dokumen			Rp 315.000,00	1,00 Dokumen	Rp 315.000,00	50,00 %	-	1,00 Dokumen	Rp -	50,00 %	-	

7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	Rp 11.980.332,00	-	R p -	1,00 Dokumen	Rp 2.496.333,00	1,00 Dokumen	Rp -	-	Rp -	1,00 Dokumen	Rp -	100,0 0%	-	1,00 Dokumen	Rp -	100,0 0%	-
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	-	Rp 13.412.712,00	-	R p -	1,00 Dokumen	Rp 2.854.428,00	1,00 Dokumen	Rp -	-	Rp 1.360.000,00	1,00 Dokumen	Rp 1.360.000,00	100,0 0%	-	1,00 Dokumen	Rp -	100,0 0%	-
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	-	Rp 12.839.760,00	-	R p -	1,00 Dokumen	Rp 2.711.190,00	-	Rp 680.000,00	-	Rp -	-	Rp 680.000,00	-	25,0 8%	-	Rp 680.000,00	-	5,30%
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	-	Rp -	-	R p -	1,00 Dokumen	Rp 2.711.190,00	1,00 Dokumen	Rp -	-	Rp 1.020.000,00	1,00 Dokumen	Rp 1.020.000,00	100,0 0%	-	1,00 Dokumen	Rp -	100,0 0%	-
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Rp 24.652.260,00	-	R p -	2,00 Laporan	Rp 5.073.690,00	-	Rp -	1,00 Laporan	Rp 840.000,00	-	Rp 840.000,00	-	-	-	Rp -	-	-
7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	Rp -	-	R p -	1,00 Dokumen	Rp 25.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	Rp -	-	R p -	1,00 Data	Rp 25.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													43,75%	6,18%						
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	-	Rp 21.732.446.660,00	-	R p -	100,00 %	Rp 3.702.739.162,00	-	Rp 1.010.780.269,00	-	Rp 870.196.707,00	-	Rp 1.880.976.976,00	-	27,3 0%	-	Rp 1.010.780.269,00	-	4,65%
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Rp 21.674.295.000,00	-	R p -	16,00 Orang/bulan	Rp 3.686.811.307,00	16,00 Orang/bulan	Rp 1.009.955.269,00	-	Rp 870.196.707,00	16,00 Orang/bulan	Rp 1.880.151.976,00	100,0 0%	27,3 9%	16,00 Orang/bulan	Rp 1.009.955.269,00	100,0 0%	4,66%
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	Rp 46.306.780,00	-	R p -	1,00 Laporan	Rp 9.691.070,00	1,00 Laporan	Rp 510.000,00	-	Rp -	1,00 Laporan	Rp 510.000,00	100,0 0%	5,26 %	1,00 Laporan	Rp 510.000,00	100,0 0%	1,10%

7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	-	Rp -	-	Rp -	4,00 Laporan	Rp 3.796.190,00	1,00 Laporan	Rp 315.000,00	-	Rp -	1,00 Laporan	Rp 315.000,00	25,00 %	8,30 %	1,00 Laporan	Rp 315.000,00	25,00 %	-
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	-	Rp 11.844.880,00	-	Rp -	1,00 Dokumen	Rp 2.440.595,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													56,25%	50,80%						
Predikat kinerja													Rendah	Sangat Rendah						
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-	Rp 92.408.192,00	-	Rp -	100,00 %	Rp 11.687.524,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Rp 92.408.192,00	-	Rp -	4,00 Laporan	Rp 11.687.524,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													-	-						
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemahaman materi bagi peserta bimtek	-	Rp 69.200.000,00	-	Rp -	90,00 %	Rp 33.600.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Rp -	-	Rp -	50,00 Orang	Rp 16.800.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	Rp 69.200.000,00	-	Rp -	16,00 Orang	Rp 16.800.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													-	-						
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	-	Rp 1.108.392.810,00	-	Rp -	90,00 %	Rp 233.544.405,00	-	Rp 74.854.580,00	-	Rp 13.094.144,00	-	Rp 87.948.724,00	-	32,05 %	-	Rp 74.854.580,00	-	6,75%
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	Rp -	-	Rp -	1,00 Paket	Rp 4.075.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-

7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Rp 440.665.000,00	-	Rp -	5,00 Paket	Rp 102.133.000,00	3,00 Paket	Rp 51.287.800,00	-	Rp -	3,00 Paket	Rp 51.287.800,00	60,00 %	50,22 %	3,00 Paket	Rp 51.287.800,00	60,00 %	11,64 %
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	-	Rp 75.000.000,00	-	Rp -	1,00 Paket	Rp 15.000.000,00	1,00 Paket	Rp 2.697.200,00	-	Rp -	1,00 Paket	Rp 2.697.200,00	100,00 %	17,98 %	1,00 Paket	Rp 2.697.200,00	100,00 %	3,60 %
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	-	Rp 40.100.000,00	-	Rp -	2,00 Paket	Rp 8.020.000,00	1,00 Paket	Rp 1.174.580,00	-	Rp 863.244,00	1,00 Paket	Rp 2.037.824,00	50,00 %	14,65 %	1,00 Paket	Rp 1.174.580,00	50,00 %	2,93 %
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	-	Rp 120.600.000,00	-	Rp -	2,00 Dokumen	Rp 18.000.000,00	1,00 Dokumen	Rp 4.485.000,00	-	Rp 2.990.000,00	1,00 Dokumen	Rp 7.475.000,00	50,00 %	24,92 %	1,00 Dokumen	Rp 4.485.000,00	50,00 %	3,72 %
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	Rp 97.492.000,00	-	Rp -	1,00 Laporan	Rp 20.623.000,00	1,00 Laporan	Rp 6.500.000,00	-	Rp 5.140.900,00	1,00 Laporan	Rp 11.640.900,00	100,00 %	31,52 %	1,00 Laporan	Rp 6.500.000,00	100,00 %	6,67 %
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	Rp 334.535.810,00	-	Rp -	3,00 Laporan	Rp 65.693.405,00	1,00 Laporan	Rp 8.710.000,00	-	Rp 4.100.000,00	1,00 Laporan	Rp 12.810.000,00	33,33 %	13,26 %	1,00 Laporan	Rp 8.710.000,00	33,33 %	2,60 %
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													56,19%	37,66%						
Predikat kinerja													Rendah	Sangat Rendah						
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	-	Rp 974.893.160,00	-	Rp -	95,00 %	Rp 305.500.000,00	-	Rp 52.716.042,00	-	Rp 62.778.056,00	-	Rp 115.494.098,00	-	17,26 %	-	Rp 52.716.042,00	-	5,41 %
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Rp 95.500.000,00	-	Rp -	12,00 Laporan	Rp 35.500.000,00	3,00 Laporan	Rp 3.938.042,00	-	Rp 1.666.056,00	3,00 Laporan	Rp 5.604.098,00	25,00 %	11,09 %	3,00 Laporan	Rp 3.938.042,00	25,00 %	4,12 %
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Rp 879.393.160,00	-	Rp -	12,00 Laporan	Rp 270.000.000,00	3,00 Laporan	Rp 48.778.000,00	-	Rp 61.112.000,00	3,00 Laporan	Rp 109.890.000,00	25,00 %	18,07 %	3,00 Laporan	Rp 48.778.000,00	25,00 %	5,55 %
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													25,00%	37,80%						
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	-	Rp 469.200.000,00	-	Rp -	95,00 %	Rp 153.000.000,00	-	Rp 13.979.378,00	-	Rp 99.407.644,00	-	Rp 113.387.022,00	-	9,14 %	-	Rp 13.979.378,00	-	2,98 %
7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Rp -	-	Rp -	5,00 Unit	Rp 58.200.000,00	2,00 Unit	Rp 6.879.378,00	-	Rp -	2,00 Unit	Rp 6.879.378,00	40,00 %	11,82 %	2,00 Unit	Rp 6.879.378,00	40,00 %	-

		Operasional atau Lapangan																			
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	Rp 69.200.000,00	-	Rp -	5,00 Unit	Rp 14.800.000,00	2,00 Unit	Rp 7.100.000,00	-	Rp -	2,00 Unit	Rp 7.100.000,00	40,00 %	47,97 %	2,00 Unit	Rp 7.100.000,00	40,00 %	10,26 %
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Rp 150.000.000,00	-	Rp -	1,00 Unit	Rp 30.000.000,00	-	Rp -	1,00 Unit	Rp 99.407.644,00	-	Rp 99.407.644,00	-	-	-	Rp -	-	-
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Rp 250.000.000,00	-	Rp -	6,00 Unit	Rp 50.000.000,00	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													20,00%	74,11%							
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)													28,74%	48,84%							
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah							
2	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat		Rp 570.990.000,00	-	Rp -	86,00 Point	Rp 415.400.000,00	-	Rp 16.530.000,00	-	Rp 136.566.400,00	-	Rp 153.096.400,00	-	3,98 %	-	Rp 16.530.000,00	-	2,89%
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan		Rp 84.000.000,00	-	Rp -	85,00 %	Rp 33.600.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	-	Rp 84.000.000,00	-	Rp -	1,00 Laporan	Rp 33.600.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													-	-							
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah							

	7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentasi hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Rp 218.190.000,00	-	Rp -	1,00 Dokumen	Rp 16.800.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-	
	7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Rp 218.190.000,00	-	Rp -	1,00 Dokumen	Rp 16.800.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-	
	7.01.02.2.03.0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	Rp -	-	Rp -	1,00 Unit	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													-	-					
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
	7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Rp 268.800.000,00	-	Rp -	90,00 %	Rp 365.000.000,00	-	Rp 16.530.000,00	-	Rp 136.566.400,00	-	4,53 %	-	Rp 16.530.000,00	-	6,15%	
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp 268.800.000,00	-	Rp -	3,00 Laporan	Rp 365.000.000,00	1,00 Laporan	Rp 16.530.000,00	-	Rp 136.566.400,00	1,00 Laporan	33,33 %	4,53 %	1,00 Laporan	Rp 16.530.000,00	33,33 %	6,15%
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													33,33%	41,94%					
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
Rata-rata capaian kinerja Program (%)													11,11%	36,86%					
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah					
3	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	Rp 56.800.000,00	-	Rp -	100,00 %	Rp 111.800.000,00	-	Rp 12.124.500,00	-	-Rp 12.124.500,00	-	10,84 %	-	Rp 12.124.500,00	-	21,35 %	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Desa	Rp 56.800.000,00	-	Rp -	100,00 %	Rp 16.800.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Rp 56.800.000,00	-	Rp -	5 Lembaga Kemasyarakatan	Rp 16.800.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-	

		Pembangunan di Desa																		
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase lembaga kemasyarakatan yang diberdayakan	Rp -	-	R p -	100,00 %	Rp 45.000.000,00	-	Rp 12.124.500,00	-	-Rp 12.124.500,00	-	Rp 12.124.500,00	-	26,94%	-	Rp 12.124.500,00	-	-
	7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Rp -	-	R p -	3 Lembaga Kemasyar akat	Rp 16.800.000,00	-	Rp 12.124.500,00	-	-Rp 12.124.500,00	-	Rp 12.124.500,00	100,00%	72,17%	-	Rp 12.124.500,00	100,00%	-
	7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Masyarakat	Rp -	-	R p -	1,00 Laporan	Rp 14.100.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
	7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp -	-	R p -	1,00 Laporan	Rp 14.100.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												33,33%	26,94%							
Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	Rp -	-	R p -	100,00 %	Rp 50.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
	7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Rp -	-	R p -	50,00 Keluarga	Rp 25.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Rp -	-	R p -	50,00 Keluarga	Rp 25.000.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)												-	-							
Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)												11,11%	10,84%							
Predikat kinerja												Sangat Rendah	Sangat Rendah							
4	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Rp 35.200.000,00	-	R p -	90,00 %	Rp 68.400.000,00	-	Rp 19.065.300,00	-	Rp -	-	Rp 19.065.300,00	-	27,87%	-	Rp 19.065.300,00	-	54,16%

	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pesentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umu.	Rp 35.200.000,00	-	R P -	80,00 %	Rp 34.800.000,00	-	Rp 19.065.300,00	-	Rp -	-	Rp 19.065.300,00	-	54,79%	-	Rp 19.065.300,00	-	54,16%
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp 31.200.000,00	-	R P -	6,00 Laporan	Rp 16.800.000,00	1,00 Laporan	Rp 3.400.000,00	-	Rp -	1,00 Laporan	Rp 3.400.000,00	16,67%	20,24%	1,00 Laporan	Rp 3.400.000,00	16,67%	10,90%
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp 4.000.000,00	-	R P -	1,00 Laporan	Rp 18.000.000,00	1,00 Laporan	Rp 15.665.300,00	-	Rp -	1,00 Laporan	Rp 15.665.300,00	100,00%	87,03%	1,00 Laporan	Rp 15.665.300,00	100,00%	391,63%
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													58,33%	27,87%						
Predikat kinerja													Rendah	Rendah						
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada	Rp -	-	R P -	95,00 %	Rp 33.600.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Rp -	-	R P -	1,00 Laporan	Rp 33.600.000,00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													-	-						
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)													29,17%	27,87%						
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						
5	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum	Rp 20.800.000,00	-	R P -	90,00 %	Rp 136.000.000,00	-	Rp 9.514.400,00	-	Rp 11.916.400,00	-	Rp 21.430.800,00	-	7,00%	-	Rp 9.514.400,00	-	45,74%
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	Rp 20.800.000,00	-	R P -	95,00 %	Rp 136.000.000,00	-	Rp 9.514.400,00	-	Rp 11.916.400,00	-	Rp 21.430.800,00	-	7,00%	-	Rp 9.514.400,00	-	45,74%

	7.01.05.2.01.0001	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	-	Rp -	-	Rp -	150,00 Orang	Rp 50.000.000,00	-	Rp -	50 orang	Rp 11.166.400,00	-	Rp 11.166.400,00	-	-	-	Rp -	-	-
	7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	-	Rp -	-	Rp -	100,00 Orang	Rp 50.000.000,00	10,00 Orang	Rp 5.014.400,00	-	Rp -	10,00 Orang	Rp 5.014.400,00	10,00 %	10,03 %	10,00 Orang	Rp 5.014.400,00	10,00 %	-
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	-	Rp 20.800.000,00	-	Rp -	1,00 Dokumen	Rp 36.000.000,00	1,00 Dokumen	Rp 4.500.000,00	-	Rp 750.000,00	1,00 Dokumen	Rp 5.250.000,00	100,00 %	12,50 %	1,00 Dokumen	Rp 4.500.000,00	100,00 %	21,63 %
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													36,67%	15,76%							
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah							
Rata-rata capaian kinerja Program (%)													36,67%	15,76%							
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah							
6	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	-	Rp -	-	Rp -	100,00 %	Rp 53.692.500,00	-	Rp 36.640.800,00	-	Rp -	-	Rp 36.640.800,00	-	68,24 %	-	Rp 36.640.800,00	-	-
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	Rp -	-	Rp -	85,00 %	Rp 53.692.500,00	-	Rp 36.640.800,00	-	Rp -	-	Rp 36.640.800,00	-	68,24 %	-	Rp 36.640.800,00	-	-

7.01.06.2.01 .0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	-	Rp -	-	R p -	7,00 Dokumen	Rp 16.957.500, 00	-	Rp -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
7.01.06.2.01 .0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-	Rp -	-	R p -	-	Rp -	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-	-	Rp -	-	-
7.01.06.2.01 .0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	-	Rp -	-	R p -	1,00 Dokumen	Rp 36.735.000, 00	-	Rp 36.640.800, 00	-	Rp -	-	Rp 36.640.800, 00	-	99,7 4%	-	Rp 36.640.800, 00	-	-
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan (%)													-	68,24%						
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sedang						
Rata-rata capaian kinerja Program (%)													-	68,24%						
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sedang						
Rata-rata capaian kinerja seluruh Program (%)													36,60%	46,77%						
Predikat kinerja													Sangat Rendah	Sangat Rendah						

Beberapa program menunjukkan kemajuan yang baik dalam realisasi anggarannya, sementara yang lain masih jauh dari target yang diharapkan. Analisis berikut ini mengidentifikasi program-program yang belum memenuhi target, telah memenuhi, atau bahkan melebihi target yang direncanakan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut.

1. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program/kegiatan

Faktor – Faktor Penyebab

1. Tidak Tercapainya Target Kinerja:

- Penundaan dalam pelaksanaan program.
- Kendala administratif atau regulasi.
- Kurangnya sumber daya atau kapasitas pelaksanaan.

2. Terpenuhinya Target Kinerja:

- Efisiensi dalam penggunaan anggaran.
- Pelaksanaan program yang sesuai dengan perencanaan.

3. Melebihi Target Kinerja:

3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra PD

Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Ciwidey adalah sebagai berikut:

- a. Positif: Program/kegiatan yang memenuhi atau melebihi target berkontribusi pada pencapaian target renstra yang lebih cepat dan efisien.
- b. Negatif: Program/kegiatan yang tidak memenuhi target dapat menghambat pencapaian keseluruhan target renstra, memerlukan revisi dan penyesuaian strategi.

4. Kebijakan / Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil

1. Penguatan Monitoring dan Evaluasi: Meningkatkan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program untuk memastikan penyelesaian tepat waktu.
2. Pengoptimalan Sumber Daya: Mengidentifikasi kebutuhan sumber daya dan kapasitas pelaksanaan, serta melakukan alokasi ulang jika diperlukan.
3. Peningkatan Kapasitas: Menyediakan pelatihan dan dukungan untuk meningkatkan kapasitas pelaksana program.

4. Pengelolaan Risiko: Mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan program dan menyiapkan rencana mitigasi.

Tabel TC.29

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan
Kecamatan Ciwidey**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan sampai dengan Tahun 2024			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2025)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Maret Tahun 2025			
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi s/d Triwulan I Tahun 2025	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(7/6)	(9)	(10)	(11)=(5+7+10)	(12)=(11/4)	
7 1 0 0 0	KECAMATAN											
7 1 1 0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Sakip Perangkat Daerah	77,60 Point	6 Point	76,60 Point	Point	0%	Point	Point	Point		
7 1 1 02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 %	3 %	100 %	100 %	100%	100 %	%	%		
7 1 1 02.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	50%
7 1 1 02.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	100%
7 1 1 02.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	5 Dokumen	3 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	5 Dokumen	100%

7	1	1	02.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	20 Lap	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	1 Laporan	45 Laporan	225%
7	1	1	02.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7 Dok	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	Dokumen	7 Dokumen	100%
7	1	1	02.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	95 %	%	25 %	25 %	100%	100 %	%	72 %	76%
7	1	1	02.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	20 Lap	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	Laporan	1 Laporan	5%
7	1	1	02.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	90 %	%	25 %	25 %	100%	90 %	%	75 %	83%
7	1	1	02.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	38 Orang	Orang	Orang	Orang	#DIV/0!	50 Orang	Unit	38 Unit	0%
7	1	1	02.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	250 org	Orang	50 Orang	50 Orang	100%	16 Orang	Orang	62 Orang	25%
7	1	1	02.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	90 %	92 %	25 %	25 %	100%	90 %	%	117 %	130%
7	1	1	02.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30 pkt	30 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	1 Paket	Paket	36 Paket	120%
7	1	1	02.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	260 pkt	18 Paket	52 Paket	52 Paket	100%	5 Paket	3 Paket	73 Paket	28%

7	1	1	02.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	160 pkt	3 Paket	32 Paket	32 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	36 Paket	23%
7	1	1	02.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	45 pkt	5 Paket	9 Paket	9 Paket	100%	2 Paket	1 Paket	15 Paket	33%
7	1	1	02.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	5 Dok	5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	2 Dokumen	1 Dokumen	7 Dokumen	140%
7	1	1	02.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5 Lap	20 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	22 Laporan	440%
7	1	1	02.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	0 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	1 Laporan	2 Laporan	40%
7	1	1	02.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 %	1 %	0 %	0 %	#DIV/0!	%	%	1 %	1%
7	1	1	02.07	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	24 Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	Unit	Unit	24 Unit	2400%
7	1	1	02.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	24 %	25 %	25 %	100%	95 %	%	49 %	49%
7	1	1	02.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Lap	30 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	45 Laporan	75%
7	1	1	02.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60 Lap	11 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	3 Laporan	26 Laporan	43%
7	1	1	02.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	95 %	9 %	30 %	30 %	100%	95 %	%	39 %	41%

7	1	1	02.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	2 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	5 Unit	2 Unit	10 Unit	42%
7	1	1	02.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	25 Unit	12 Unit	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	2 Unit	19 Unit	76%
7	1	1	02.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	Unit	Unit	2 Unit	200%
7	1	1	02.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	84 Unit	6 Unit	6 Unit	100%	1 Unit	Unit	90 Unit	300%
7	1	1	02.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	10 ₅ Unit	0 Unit	0 Unit	#DIV/0!	6 Unit	Unit	10 ₅ Unit	#####
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	87 Nilai	2 nilai	85 nilai	85 Nilai	100%	86 Nilai	Nilai	87 Nilai	100%
7	1	2	02.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	85 %	45 %	85 %	85 %	100%	90 %	%	130 %	153%
7	1	2	02.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan	8 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	Laporan	9 Laporan	180%

7	1	2	02.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	95 %	0 %	30 %	30 %	100%	100 %	%	30 %	32%
7	1	2	02.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	16 Dok	107 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	Dokumen	111 Dokumen	694%
7	1	2	02.03	2	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	0 org	4 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	orang	orang	4 orang	0%
7	1	2	02.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	90 %	42 %	90 %	90 %	100%	%	%	132 %	147%
7	1	2	02.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	11 Lap	42 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	3 Laporan	1 Laporan	45 Laporan	409%
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100 %	7 %	25 %	25 %	100%	100 %	%	32 %	32%
7	1	3	02.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100 %	2 %	25 %	25 %	100%	100 %	%	27 %	27%
7	1	3	02.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	30 Kemas y	0 Kemas y	1 Kemas y	1 Kemas y	100%	5 Kemas y	Lemb Kemas y	1 Kemas y	3%
					Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan	2 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	Laporan	Laporan	3 Laporan	75%

7	1	3	02.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	90 %	0 %	90 %	90 %	100%	%	%	90 %	100%
7	1	3	02.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5 Lemb Kemas y	3 Lemb Kemas y	1 Lemb Kemas y	1 Lemb Kemas y	100%	3 Lemb Kemas y	3 Lemb Kemas y	7 Lemb Kemas y	140%
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan		1	0	0 %	#DIV/0!	100 %	%	1 %	0%
7	1	3	02.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Lap	0 Lapora n	1 Lapora n	1 Lapora n	100%	1 Lapora n	Lapora n	1 Lapora n	25%
7	1	3	02.03	5	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	4 Lap	0 Keluar ga	1 Lapora n	1 Lapora n	100%	1 Lapora n	Lapora n	1 Lapora n	25%
7	1	3	02.06		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		0 Keluar ga	Keluar ga	Keluar ga	#DIV/0!	100 Keluar ga	Keluar ga	0 Keluar ga	0%
7	1	3	02.03	10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam		40 Keluar ga	Keluar ga	Keluar ga	#DIV/0!	50 Keluar ga	Keluar ga	40 Keluar ga	0%
7	1	3	02.03	11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga		40 Keluar ga	Keluar ga	Keluar ga	#DIV/0!	50 Keluar ga	Keluar ga	40 Keluar ga	0%
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	90 %	10 %	20 %	20 %	100%	90 %	%	30 %	33%
7	1	4	02.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	90 %	1 %	20 %	20 %	100%	80 %	%	21 %	23%
7	1	4	02.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	16 Lap	47 Lapora n	4 Lapora n	4 Lapora n	100%	6 Lapora n	1 Lapora n	52 Lapora n	325%

7	1	4	02.01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan	3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	5 Laporan	125%
7	1	4	02.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	95 %	44 %	25 %	25 %	100%	95 %	%	69 %	73%
7	1	4	02.02	1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	5 Laporan	45 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	Laporan	46 Laporan	920%
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan ke pemerintah daerah	90 %	100 %	24 %	24 %	100%	195 %	%	124 %	138%
7	1	5	02.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	95 %	50 %	24 %	24 Laporan	100%	95 %	Laporan	74 Laporan	78%
7	1	5	02.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	550 org	100 orang	0 orang	0 orang	#DIV/0!	150 orang	orang	100 orang	18%

7	1	5	02.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	250 0 orang	50 orang	500 Orang	50 0 Orang	100%	10 0 Orang	1 0 Orang	56 0 Orang	22%
7	1	5	02.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	16 dok	50 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	55 Dokumen	344%
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	0 %	25 %	25 %	100%	10 0 %	%	25 %	25%
7	1	6	02.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	persentase desa yang dibina	100 %	14 %	25 %	25 %	100%	85 %	%	39 %	39%
7	1	6	02.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	35 Dokumen	3 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	Dokumen	10 Dokumen	29%
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	2 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	0 Dokumen	#DIV/0!	Dokumen	Dokumen	0 Dokumen	0%
7	1	6	02.01	9	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5 Dok	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	3 Dokumen	60%
7	1	6	2	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				Laporan	#DIV/0!	Laporan	Laporan	0 Laporan	0%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kecamatan Ciwidey merupakan perangkat daerah yang menjalankan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang tugas-tugas Camat dan tidak ada ketentuan/peraturan perundang-undangan yang mengamanatkan standar pelayanan minimal tertentu/lainnya selain ketentuan tentang Indikator Kinerja Utama yang dimiliki.

Kecamatan Ciwidey sebagai sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah Kecamatan semata melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan target kinerja Kecamatan Ciwidey untuk Tahun 2021-2026 telah ditetapkan dengan Keputusan Camat Ciwidey Nomor : PC.05.01/Kep 04- kec /2022 tanggal 24 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026 merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ciwidey sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciwidey. Indikator Kinerja Utama tersebut tertuang dalam Renstra Kecamatan Ciwidey Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang menjadi tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Ciwidey. Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Ciwidey tersaji dalam table T-C.30 sebagai berikut :

Tabel T-C. 30

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Ciwidey
Kabupaten Bandung**

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IK K	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISA
				TAHUN 2023	TAHUN 2025	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2025	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan			76	76,6	77	77,6	-	77,55	77,6	77,6	

2	Persentase BMD dalam Kondisi Baik			94,7	94,8	94	94,7	-	95	95	95,6	
3	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan			84	85	86	87	-	85	87	88	
4	Persentase desa yang beradministrasi baik			100	100	100	100	-	100	100	100	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Pada Kecamatan Ciwidey diidentifikasi ada beberapa permasalahan yang dapat dijadikan dasar isu strategis, yang dapat menghambat dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Kecamatan Ciwidey yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan;

Faktor yang mempengaruhi pelayanan pada Kantor Kecamatan Ciwidey ditinjau dari sasaran jangka menengah adalah :

1. Pegawai belum semuanya mendapatkan diklat teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
2. Sarana dan prasarana kantor belum terpenuhi secara keseluruhan;
3. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pembangunan serta pelaksanaan kegiatan sosial;
4. Belum optimalnya kordinasi antar sektoral di Tingkat Kecamatan yang diharapkan dapat mempelancar dan mempertajam analisa perencanaan pembangunan.

1.3.2 Peluang dan Tantangan

Dalam mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi menggunakan analisis lingkungan strategis (Analisis SWOT / *Strenght, Weaknes, Opportunity and Threath*). Dengan hasil pada masing-masing analisis sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal
 - a. Faktor Kekuatan (Strong)

- 1) Sumber Daya Manusia (pegawai) yang mempunyai pendidikan memadai serta semangat untuk belajar terhadap tugas pokok dan fungsinya.
 - 2) Tersedianya sarana / prasarana dan dukungan dana / pembiayaan sangat membantu kelancaran dalam melayani dan memfasilitasi pemerintah Desa dan memperlancar kegiatan di Kecamatan.
 - 3) Sistem kekeluargaan yang telah terbangun, hubungan koordinasi dan konsultasi yang berjalan baik bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat baik bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan;
 - 4) Adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan penyelenggaraan pelayanan;
 - 5) Adanya ketersediaan dana yang senantiasa mendukung tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciwidey.
- b. Faktor Kelemahan (Weakness)
- 1) Kurangnya jumlah pegawai di Sekretariat kecamatan yang memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - 2) Perkembangan teknologi informasi tidak diimbangi semangat untuk belajar dari sebagian besar pegawai yang ada;
 - 3) Kurangnya kapasitas aparatur kecamatan untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan;
 - 4) Sarana prasarana untuk mendukung Sistem Informasi Manajemen (SIM) kurang memadai;
 - 5) Belum ada pelatihan sebagai tenaga operator komputer yang berhubungan dengan pelayanan.
 - 6) Belum tersedia data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala dalam merencanakan pembangunan yang komprehensif dan berkesinambungan.
 - 7) Belum adanya sumber daya perencana yang berkualitas dan belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.
 - 8) Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi dalam mengemban mandat kewenangan organisasi yang sangat

strategis;

- 9) Kinerja aparaturnya yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
- 10) Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan tidak merata di semua bidang akibatnya terjadi ketimpangan;
- 11) Manajemen pengelolaan keuangan organisasi relatif masih kurang dikelola secara optimal.

2. Analisis Lingkungan Eksternal

a. Faktor Peluang (Opportunity)

- 1) Kepemimpinan yang punya jangkauan kedepan (Visioner), berkomitmen dan berintegritas menciptakan pembangunan yang partisipatif;
- 2) Adanya program-program pemerintah di bidang pemerintahan, kemasyarakatan dan pembangunan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Ciwidey;
- 3) Penerapan otonomi daerah yang memberikan kesempatan berprakarsa seluas-luasnya bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- 4) Hubungan yang harmonis dengan instansi yang lain dan juga dengan para pemangku kepentingan;
- 5) Dukungan struktur Stakeholder yang terkait dengan perencanaan daerah cukup tinggi, nampak jelas dari tingkat aktifitas dalam menghadiri undangan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Kecamatan Ciwidey;
- 6) Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal, pendidikan dan latihan bagi setiap pegawai;
- 7) Mudah akses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mempermudah upaya meningkatkan profesionalisme.

b. Faktor Ancaman (Threat)

- 1) Kondisi masyarakat yang tidak sama baik tingkat sosial ekonomi, pendidikan dan hal-hal yang lain berpengaruh terhadap cara pandang pola pikir;
- 2) Masih adanya aparat pemerintahan dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- 3) Kebijakan pemerintah yang kurang sosialisasi;

- 4) Adanya keleluasaan partisipasi publik menyebabkan perencanaan pembangunan cenderung kurang profesional;
- 5) Adanya perubahan regulasi terkait pelimpahan kewenangan;
- 6) Adanya perbedaan tugas pokok dan fungsi menyebabkan miskoordinasi;
- 7) Kecenderungan SDM aparatur yang kompeten sulit diatur;
- 8) Adanya ketergantungan terhadap dunia maya.

2.3.3 Isu-isu Penting/Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Mendasarkan permasalahan pembangunan pada Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Administrasi Pemerintahan, maka isu strategis pembangunan kabupaten Bandung yang kemungkinan akan dihadapi Kecamatan Ciwidey dalam Penyelenggaraan Tugas-Tugas Camat pada Tahun 2025 dirumuskan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
2. Belum optimalnya pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan menuju *good governance*;
3. Belum optimalnya gerakan revolusi mental meliputi integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
4. Belum seimbangnya antara beban kerja dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia di tingkat kecamatan;
5. Belum optimalnya kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan kelurahan dan desa;
6. Perlunya optimalisasi pendelagasian wewenang dari Bupati kepada Camat untuk mempercepat penyelenggaran pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan.

Isu – isu dan permasalahan tersebut di atas perlu penanganan secara Komprehensif. Implikasi terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciwidey sebagai berikut :

1. Perlunya Optimalisasi fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
2. Perlunya memperkuat dan meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip

penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi);

3. Perlunya meningkatkan integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
4. Perlunya mengupayakan ketersediaan Sumber Daya Manusia di Kecamatan agar sesuai dengan beban kerja berdasarkan analisis beban kerja;
5. Perlunya optimalisasi pendelagasian wewenang dari Bupati kepada Camat untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan;
6. Program Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) perlu dievaluasi untuk ditingkatkan kembali baik sarana dan prasarana dan yang lebih sangat vital sumber daya manusianya;
7. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat;
8. Membangun komitmen dan integritas seluruh pegawai untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri dalam menghadapi tugas pokok dan fungsi untuk mengimbangi perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat;
9. Menerapkan kebijakan pola kerja, pola pembinaan pegawai yang sesuai dengan potensi dan kondisi sebagai bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Bandung dalam mengambil atau memutuskan kebijakan yang strategis demi kepentingan masyarakat;
10. Perlunya peningkatan fasilitasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Penyerapan aspirasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
12. Perlunya peningkatan sarana dan prasarana;

Berdasarkan pada analisa lingkungan internal dan eksternal yang telah dilakukan, maka dapat ditetapkan faktor – faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Optimalnya fungsi kerja perumusan kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi perangkat daerah;
2. Penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik (transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi);
3. Keseimbangan antara beban kerja dan ketersediaan sumber daya manusia;

4. Adanya penguatan kelembagaan Kecamatan Ciwidey;
5. Adanya dukungan Sumber Daya Manusia yang memiliki keinginan untuk senantiasa meningkatkan wawasan dan pengetahuannya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Ciwidey;
6. Tersedianya anggaran yang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey;
7. Adanya Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan dalam manajemen pemerintahan dan pelayanan yang efektif dan efisien.
8. Kapasitas ASN Kecamatan dalam rangka pembinaan kelurahan dan desa yang memadai;
9. Pendelegasian wewenang dari Bupati kepada Camat untuk mempercepat penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan dan pembangunan;
10. Integritas, budaya kerja dan kerjasama dikalangan birokrasi;
11. Sarana dan prasarana yang memadai;
12. Inovasi, kreatifitas, pemanfaatan teknologi;
13. Kondisi dan Situasi yang kondusif.

Kecamatan Ciwidey dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, nasional dan regional dan dunia internasional. Era globalisasi mau tidak mau, siap atau tidak siap sudah di depan mata, oleh sebab itu Perencanaan Pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Dengan memperhatikan isu – isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Ciwidey menuju *good goverance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Membandingkan Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan dilaksanakan agar pada penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan. Tim Penyusun Renja di Tingkat Kecamatan melakukan inventarisasi kebutuhan berdasarkan permasalahan yang ada yang menjadi hambatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan.

Melakukan Koordinasi untuk merumuskan perencanaan Tahun berikutnya dengan acuan Rancangan Awal RKPD dan melakukan penelaahan terhadap Permasalahan yang ada dan merupakan Prioritas untuk dilaksanakan, Terdapat beberapa perbedaan terutama pada pagu indikatif antara Rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, hal tersebut. Program dan kegiatan pada Rencana Kerja RKPD tersebut adalah sebagaimana Tabel **Tabel T-C31** berikut :

Tabel T-C31
Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Kecamatan Ciwidey Tahun 2025

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting		
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)			
					4.357.859.168					5.153.563.517			
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		NILAI AKIP Persentase BMD dalam kondisi baik	75,6 94,6	Poin %	4.026.331.668	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		NILAI AKIP PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	75,6 94,6	Poin %	4.508.271.017	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	18.199.926	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	100	%	68.199.926	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	2.353.095	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dok	2.353.095	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	2.496.333	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dok	2.496.333	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	2.854.428	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1	Dok	2.854.428	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	2.711.190	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dok	2.711.190	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dok	2.711.190	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	1	Dok	2.711.190	

			Dokumen Perubahan DPA-SKPD						Dokumen Perubahan DPA-SKPD				
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	5.073.690	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	Lap	5.073.690	
7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	0	dok	-	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	dok	25.000.000	
8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec Ciwidey	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0	data	-	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kec Ciwidey	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	data	25.000.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	%	3.400.746.523	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu	100	%	3.702.739.162	
9	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Ciwidey	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	org/b ln	3.384.818.668	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec Ciwidey	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16	org/b ln	3.686.811.307	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	9.691.070	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Lap	9.691.070	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4	Lap	3.796.190	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Lap	3.796.190	
12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1	Dok	2.440.595	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Pelaporan dan	1	Dok	2.440.595	

			Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	94,60	%	11.687.524	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai ketentuan	94,60	%	11.687.524	
13	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Ciwid ey	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Lap	11.687.524	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec Ciwid ey	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Lap	11.687.524	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	0,9	%	13.840.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase dokumen pelaksanaan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang tepat waktu	0,9	%	33.600.000	
14	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Ciwid ey	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-UndanganJumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	org	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Ciwid ey	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	orang	16.800.000	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Ciwid ey	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	orang	13.840.000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kec Ciwid ey	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50	orang	16.800.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	0,9	%	233.544.405	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Dokumen pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor	0,9	%	233.544.405	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Ciwid ey	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	pkt	4.075.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec Ciwid ey	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	6	pkt	4.075.000	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Ciwid ey	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52	pkt	102.133.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec Ciwid ey	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	52	pkt	102.133.000	
18	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Ciwid ey	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32	pkt	15.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kec Ciwid ey	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	32	pkt	15.000.000	

19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Ciwidey	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	pkt	8.020.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec Ciwidey	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	9	pkt	8.020.000	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dok	18.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec Ciwidey	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1	Dok	18.000.000	
21	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Lap	20.623.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Lap	20.623.000	
22	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	65.693.405	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Lap	65.693.405	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	%	195.313.290	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	%	305.500.000	
23	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	19.500.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Lap	35.500.000	
24	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	175.813.290	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Lap	270.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	95	%	153.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase BMD dalam Kondisi Baik	95	%	153.000.000	
25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Ciwidey	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	58.200.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec Ciwidey	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	58.200.000	
26	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Ciwidey	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	14.800.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec Ciwidey	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	14.800.000	
27	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Ciwidey	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec Ciwidey	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	Unit	30.000.000	

28	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Ciwid ey	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec Ciwid ey	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	50.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	83	%	58.035.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT	83	%	275.400.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	85	%	16.800.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan guna Mendukung Pelayanan Prima kepada Masyarakat di Kecamatan	85	%	33.600.000	
29	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Ciwid ey	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Lap	16.800.000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec Ciwid ey	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1	Lap	33.600.000	
	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	95	%	7.635.000	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	95	%	16.800.000	
30	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	Dok	7.635.000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	Dok	16.800.000	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	90	%	33.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	90	%	225.000.000	
31	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Ciwid ey	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Lap	33.600.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec Ciwid ey	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Lap	225.000.000	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100	%	73.200.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100	%	111.800.000	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	%	16.800.000	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Persentase koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	100	%	16.800.000	
32	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Ciwid ey	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lemb Kema sy	16.800.000	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kec Ciwid ey	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	Lemb Kema sy	16.800.000	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	90	%	56.400.000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		persentase lembaga kemasyarakatan yang terfasilitasi	90	%	45.000.000	
33	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Ciwid ey	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	2	Lemb Kema sy	28.200.000	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kec Ciwid ey	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	1	Lemb Kema sy	16.800.000	
34	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec Ciwid ey	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan				Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec Ciwid ey	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	5	Unit		Tambah Sub Keg pd Renstra
35	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Ciwid ey	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Lap	14.100.000	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec Ciwid ey	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Lap	14.100.000	
36	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec Ciwid ey	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Lap	14.100.000	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kec Ciwid ey	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Lap	14.100.000	
	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	0	%	-	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan		Persentase masyarakat desa dan kelurahan yang dibina	100	%	50.000.000	
37	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec Ciwid ey	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	0	Klg	-	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kec Ciwid ey	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50	Klg	25.000.000	
38	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Keluarga	Kec Ciwid ey	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	0	Klg	-	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kec Ciwid ey	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50	Klg	25.000.000	Tambah Sub Keg pd

													Renstra
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	85	%	41.400.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	85	%	68.400.000	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85	%	7.800.000	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	85	%	34.800.000	
39	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	7.800.000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Lap	16.800.000	
40	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat			-	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Lap	18.000.000	Tambah Sub Kegpd Renstra
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	90	%	33.600.000	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	90	%	33.600.000	
41	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	org	33.600.000	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kec Ciwidey	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1	lap	33.600.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan ke pemerintah daerah	90	%	105.200.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Persentase capaian keberhasilan urusan pemerintahan umum yang ditugaskan ke pemerintah daerah	90	%	136.000.000	

	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	95	%	105.200.000	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	95	%	136.000.000	
42	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Ciwid ey	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	550	org	50.000.000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec Ciwid ey	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	0		50.000.000	
43	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Ciwid ey	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional				Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec Ciwid ey	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	550	orang		Tambah Sub Keg pd Renstra
44	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Ciwid ey	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500	org	50.000.000	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec Ciwid ey	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500	org	50.000.000	
45	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	5.200.000	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dok	36.000.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	53.692.500	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase desa yang dibina dan diawasi	100	%	53.692.500	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase desa yang dibina	100	%	53.692.500	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		persentase desa yang dibina	100	%	53.692.500	
46	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	5	Dok	-	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	7	Dok	-	Tambah Sub Keg pd Renstra
47	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	Dok	16.957.500	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7	Dok	16.957.500	
48	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			-	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0		-	Tambah Sub Keg pd Renstra
49	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dok	36.735.000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kec Ciwid ey	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1	Dok	36.735.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Musrenbang merupakan hasil dari sebuah perencanaan yang tertuang dalam rencana kerja kecamatan dan menghasilkan dokumen usulan yang merupakan hasil kinerja dari tujuan, sasaran, program dan kegiatan. Sesuai dengan Perundang – undangan bahwa usulan Program Kegiatan berbasis partisipatif yang mengutamakan usulan – usulan yang diusulkan oleh pemangku kepentingan di wilayah Desa melalui Musrenbang Desa yang melibatkan seluruh unsur pemangku kepentingan di Desa, dan usulan tersebut menjadi prioritas Pembangunan di Desa yang akan diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang Kecamatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan melibatkan seluruh perwakilan dari Desa dan pemangku kepentingan di tingkat Kecamatan, dan usulan tersebut terbagi dalam bidang – bidang yaitu Bidang Sosial.Budaya, Bidang Ekonomi, dan Bidang Infrastruktur. Dari hasil Musrenbang tersebut didokumentasikan oleh Tim Musrenbang Kecamatan ke dalam Daftar Skala Prioritas Kecamatan untuk diusulkan pada Musrenbang di tingkat Kabupaten

Tingkat kesesuaian usulan dari Desa yang diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, secara keseluruhan 60% sesuai dengan isu – isu penting penyelenggaraan Tupoksi Perangkat Daerah, namun demikian karena dibatasi kuota Pagu anggaran Kecamatan usulan tersebut tidak terakomodir secara keseluruhan. Dan secara umum penyelenggaraan musrenbang di tingkat Kecamatan telah memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Desa dan Kecamatan. Daftar skala Prioritas Kecamatan untuk di Desa – Desa yang disetujui masuk dalam RKP OPD/Dinas terkait dan RKPD Kabupaten Bandung dan untuk Program kegiatan di Kecamatan diolah melalui Renstra yang terbagi dalam Urusan Rutin dan Kewilayahan.

Adapun hasil kinerja yang merupakan output dan outcome dari program perencanaan Daerah dengan Kegiatan Musrenbang adalah tingkat usulan yang disetujui oleh Dinas Teknis terkait.

Tabel T-C 32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2025

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
N I H I L					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, tujuan merupakan rumusan umum mengenai hal-hal yang ingin dicapai dalam jangka menengah oleh Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk yang lebih spesifik, terukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, serta menjadi dasar dalam penyusunan program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran tersebut menjadi instrumen penting dalam mengarahkan fokus pembangunan dan mewujudkan sinergi antara kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan pelaksanaan pembangunan di tingkat kecamatan. mendukung pelaksanaan Misi Ketiga Bupati Bandung Tahun 2025–2029, yaitu “Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang partisipatif, transparan, dan akuntabel”, Kecamatan Ciwidey menetapkan arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029. Berdasarkan sasaran pembangunan daerah, yaitu “Meningkatnya kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien”, Kecamatan Ciwidey telah merumuskan tujuan jangka menengah yaitu “Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”.

Tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran yang lebih terukur, yakni “Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan”. Adapun indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud adalah Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) untuk mengukur kualitas peningkatan pelayanan publik secara umum, dan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebagai indikator capaian tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh Kecamatan Ciwidey. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut menjadi bagian dari upaya nyata Kecamatan Ciwidey dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berintegritas.

Untuk memperjelas kerangka kerja dari tujuan dan sasaran perangkat daerah maka diperlukan penentuan indikator kinerja dari

turunan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tabel 3.1 merupakan matriks indikator kinerja dari tujuan dan sasaran beserta turunannya.:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	KET
Meningkatnya Kualitas Birokrasi yang Lebih Transparan, Akuntabel, Efektif dan Efisien	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				Laju IKM		
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kecamatan			Nilai IKM		
			Meningkatnya kapasitas kelembagaan kecamatan dalam mengelola urusan pemerintahan umum sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah		Persentase pelaksanaan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan umum dari Kepala Daerah kepada Camat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan	Persentase koordinasi kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	

				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	

				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan	Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
			Meningkatnya efektivitas koordinasi dalam penegakan Peraturan Daerah guna mewujudkan kondisi masyarakat yang tenteram dan tertib		Persentase koordinasi penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

				Terlaksananya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Koordinasi dan Pembinaan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
				Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
				Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
				Terlaksananya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan	Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	

				Terlaksananya Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	
			Meningkatnya efektivitas koordinasi kecamatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di wilayah kerja kecamatan		Persentase koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
					Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	
				Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Fasilitasi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek Sosialisasi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	

				Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal Regional dan Nasional	
				Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	
			Meningkatnya kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan Masyarakat		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan yang dibina	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
				Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	

				Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
				Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
				Meningkatnya Kualitas Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	
				Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
				Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	

				Meningkatnya Pemberdayaan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase fasilitasi dan pembinaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	
				Terlaksananya peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
				Meningkatnya Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	

				Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
				Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
				Terlaksananya Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
				Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	

			Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa melalui pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang berkesinambungan di wilayah kecamatan		Persentase pembinaan monitoring dan evaluasi pemerintahan desa	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya fasilitasi Desa dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa	Persentase desa yang dibina dan diawasi	Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	

				Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
				Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
			Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah		1. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah 2. Indeks Manajemen Risiko Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	
				Terlaksananya Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP	Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

				Tersedianya Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

				Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Tersedianya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang tepat waktu	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Terlaksananya Administrasi BMD	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu	Persentase Dokumen Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	

				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan Dokumen Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	

				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Persentase BMD dalam Kondisi Baik	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
--	--	--	--	--	---	---	--

3.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan Rencana Kerja tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Bandung mempergunakan SIPD atau Sistem Informasi Perencanaan Daerah dengan tujuan untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan-penganggaran pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah daerah secara keseluruhan.

Di tahun 2025 Kecamatan Ciwidey merencanakan melaksanakan 6 program yang dijabarkan dalam 16 kegiatan 39 Sub Kegiatan. Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program dan kegiatan yang dimaksud. Untuk kegiatan-kegiatan rutin, dialokasikan pada kantor Kecamatan Ciwidey, sedangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target kinerja Kecamatan Ciwidey disesuaikan dengan sasaran target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung Tahun 2021–2026. Penjabaran program dan kegiatan Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebagaimana T-C. 33.

Tabel 3. 1 (TC-33)

**Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kecamatan Ciwidey Kabupaten Bandung**

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan							Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025				
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025							
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14	18	19			
		KECAMATAN CIWIDEY			5.293.563.517,00	5.665.609.409,56	5.681.532.056,00				5.681.532.056,00			
7		UNSUR KEWILAYAHAN			5.293.563.517,00	5.665.609.409,56	5.681.532.056,00				5.681.532.056,00			
7	01	KECAMATAN			5.293.563.517,00	5.665.609.409,56	5.681.532.056,00				5.681.532.056,00			
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai Akip	77 Point	77 Point	4.508.271.017,00	4.856.716.909,56	5.066.257.779,00		77 Point	5.066.257.779,00	
7	01	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	100 %	68.199.926,00	72.199.926,00	72.199.926,00		100 %	72.199.926,00	
7	01	01	2.01	00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.353.095,00	2.353.095,00	2.353.095,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Dokumen	2.353.095,00

7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD										
1	1	1	01	02		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.496.333,00	2.496.333,00	2.496.333,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	2.496.333,00
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD										
1	1	1	01	03		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.854.428,00	4.854.428,00	7.397.139,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	7.397.139,00
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD										
1	1	1	01	04		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.711.190,00	2.711.190,00	2.711.190,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	2.711.190,00
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD										
1	1	1	01	05		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.711.190,00	4.711.190,00	7.431.190,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	7.431.190,00
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD										
1	1	1	01	06		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	2 Laporan	2 Laporan	5.073.690,00	5.073.690,00	5.073.690,00	Kab. Bandung, Ciwidey,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	2 Laporan	5.073.690,00

					Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						Semua Kel/De sa				
7	0	0	2.	00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah										08
	1	1	01		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000, 00	25.000.000, 00	15.455.300, 00	Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	15.455.300, 00	
7	0	0	2.	00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah										09
	1	1	01		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	25.000.000, 00	25.000.000, 00	4.195.581,0 0	Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Data	4.195.581,0 0	
7	0	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100 %	100 %	3.702.739.1 62,00	4.020.785.0 54,56	4.020.785.0 54,56		100 %	4.020.785.0 54,56	
7	0	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN										01
	1	1	02		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bul an	16 Orang/bul an	3.686.811.3 07,00	4.008.857.1 99,56	4.251.232.1 88,00	Kab. Bandu ng, Ciwidey , Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	16 Orang/bul an	4.251.232.1 88,00	
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										05
	1	1	02		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 Laporan	1 Laporan	9.691.070,0 0	5.691.070,0 0	5.691.070,0 0	Kab. Bandu ng, Ciwidey ,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Laporan	5.691.070,0 0	

					Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						Semua Kel/Desa			
7	0	0	2.	00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD									
	1	1	02	07	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.796.190,00	3.796.190,00	3.796.190,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	3.796.190,00
7	0	0	2.	00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran									
	1	1	02	08	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.440.595,00	2.440.595,00	2.440.595,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	2.440.595,00
7	0	0	2.		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 %	100 %	11.687.524,00	11.687.524,00	11.687.524,00		100 %	11.687.524,00
7	0	0	2.	00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD									
	1	1	03	05	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	4 Laporan	11.687.524,00	11.687.524,00	11.687.524,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	4 Laporan	11.687.524,00
7	0	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemahaman materi bagi peserta bimtek	90 %	90 %	33.600.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		90 %	40.000.000,00
7	0	0	2.	00	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
	1	1	05	10	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi	50 Orang	50 Orang	16.800.000,00	40.000.000,00	36.065.000,00	Kab. Bandung	PENDAP ATAN	50 Orang	36.065.000,00

					Peraturan Perundang-Undangan						ng, Ciwidey, Semua Kel/Desa	ASLI DAERAH (PAD)			
7	0	0	2.	00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan										
1	1	1	05	11		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	16 Orang	16.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	16 Orang	0,00
7	0	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	90 %	90 %	233.544.405,00	233.544.405,00	233.544.405,00			90 %	233.544.405,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi										
1	1	1	06	01	Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.075.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Paket	4.075.000,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
1	1	1	06	02		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	102.133.000,00	102.133.000,00	110.697.700,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	5 Paket	110.697.700,00
7	0	0	2.	00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga										
1	1	1	06	03		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey	PENDAP ATAN ASLI	1 Paket	15.000.000,00

					Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						Ciwidey , Semua Kel/De sa	DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)		
7	01	02	2.03		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentasi hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00		1 Dokumen	16.800.000,00
7	01	02	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum									
					Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	12.995.300,00	Kab. Bandung, Ciwidey , Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	12.995.300,00
7	01	02	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta									
					Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Ciwidey , Semua Kel/De sa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Unit	0,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90 %	90 %	365.000.000,00	338.600.000,00	338.600.000,00		90 %	338.600.000,00
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3 Laporan	3 Laporan	365.000.000,00	338.600.000,00	230.339.334,00	Kab. Bandung, Ciwidey , Semua	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	3 Laporan	230.339.334,00

					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	18.037.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	18.037.000,00	
7	016				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	53.692.500,00	53.692.500,00	48.897.500,00			100 %	48.897.500,00
7	016	2.01			Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85 %	85 %	53.692.500,00	53.692.500,00	53.692.500,00			85 %	53.692.500,00
7	016	2.01	0003		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa										
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	16.957.500,00	16.957.500,00	12.162.500,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	7 Dokumen	12.162.500,00	
7	016	2.01	0006		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa										
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	0 Dokumen	0,00	
7	016	2.01	0009		Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa										

					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	36.735.000,00	36.735.000,00	36.735.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1 Dokumen	36.735.000,00	
J U M L A H								5.293.563.517,00	5.665.609.409,56	5.681.532.056,00					5.681.532.056,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi menyokong terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan Kecamatan. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Penyajian program dan kegiatan dilakukan berdasarkan urusan/fungsi penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan yang dimaksudkan untuk mencapai Indikator Kinerja Tahun 2025 dengan capaian Kinerja yang optimal sesuai dengan Perencanaan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban.

Tabel 4.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									
			Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana			
			Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025					
2	3	4	8	9	10	11	12	13	14			
		KECAMATAN CIWIDEY			5.293.563.517,0 0	5.665.609.409,5 6	5.681.532.056,0 0					
7		UNSUR KEWILAYAHAN			5.293.563.517,0 0	5.665.609.409,5 6	5.681.532.056,0 0					
7	0 1	KECAMATAN			5.293.563.517,0 0	5.665.609.409,5 6	5.681.532.056,0 0					
7	0 1	0 1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOT A	Nilai Akip	77 Point	77 Point	4.508.271.017,0 0	4.856.716.909,5 6	5.066.257.779,0 0		
7	0 1	0 1	2.0 1	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	100 %	68.199.926,00	72.199.926,00	72.199.926,00		
7	0 1	0 1	2.0 1	000 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2.353.095,00	2.353.095,00	2.353.095,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0 1	0 1	2.0 1	000 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD							
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.496.333,00	2.496.333,00	2.496.333,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD								
	1	1	1	3		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.854.428,00	4.854.428,00	7.397.139,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD								
	1	1	1	4		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.711.190,00	2.711.190,00	2.711.190,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD								
	1	1	1	5		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	2.711.190,00	4.711.190,00	7.431.190,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
	1	1	1	6		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	2 Laporan	5.073.690,00	5.073.690,00	5.073.690,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah								
	1	1	1	8		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	15.455.300,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah								
	1	1	1	9		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data	1 Data	25.000.000,00	25.000.000,00	4.195.581,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

7	0	0	2.0		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen keuangan	100 %	100 %	3.702.739.162,00	4.020.785.054,56	4.020.785.054,56		
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 Orang/bulan	16 Orang/bulan	3.686.811.307,00	4.008.857.199,56	4.251.232.188,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
				5		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.691.070,00	5.691.070,00	5.691.070,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD								
				7		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4 Laporan	3.796.190,00	3.796.190,00	3.796.190,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								
				8		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	2.440.595,00	2.440.595,00	2.440.595,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	100 %	100 %	11.687.524,00	11.687.524,00	11.687.524,00		
7	0	0	2.0	000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
				5		Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan	4 Laporan	4 Laporan	11.687.524,00	11.687.524,00	11.687.524,00	Kab. Bandung, Ciwidey,	PENDAPAT AN ASLI

						Barang Milik Daerah pada SKPD						Semua Kel/Desa	DAERAH (PAD)	
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemahaman materi bagi peserta bimtek	90 %	90 %	33.600.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00			
7	0	0	2.0	001	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan									
			5	0		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	50 Orang	16.800.000,00	40.000.000,00	36.065.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2.0	001	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan									
			5	1		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	16 Orang	16 Orang	16.800.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan operasional perkantoran	90 %	90 %	233.544.405,00	233.544.405,00	233.544.405,00			
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
			6	1		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	4.075.000,00	4.075.000,00	4.075.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
			6	2		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket	102.133.000,00	102.133.000,00	110.697.700,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
			6	3		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	

7	0	0	2.0	000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
	1	1	6	5		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	8.020.000,00	8.020.000,00	8.020.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan								
	1	1	6	6		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Kunjungan Tamu								
	1	1	6	8		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	20.623.000,00	20.623.000,00	20.623.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
	1	1	6	9		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	3 Laporan	65.693.405,00	65.693.405,00	49.443.405,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Jasa Penunjang Operasional Perkantoran	95 %	95 %	305.500.000,00	305.500.000,00	305.500.000,00		
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
	1	1	8	2		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	35.500.000,00	35.500.000,00	16.117.069,00	Kab. Bandung, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
	1	1	8	4		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	270.000.000,00	293.855.520,00	Kab. Bandung, Ciwidey,	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

												Semua Kel/Desa		
7	0 1	0 1	2.0 9		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	95 %	95 %	153.000.000,00	173.000.000,00	173.000.000,00			
7	0 1	0 1	2.0 9	000 2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan									
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit	5 Unit	58.200.000,00	58.200.000,00	58.200.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0 1	0 1	2.0 9	000 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	14.800.000,00	14.800.000,00	14.200.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0 1	0 1	2.0 9	000 9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0 1	0 1	2.0 9	001 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit	6 Unit	50.000.000,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	
7	0 1	0 2			PROGRAM PENYELENGGARA AN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indek Kepuasan Masyarakat	86 Point	86 Point	415.400.000,00	439.000.000,00	323.593.327,00			

7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	85 %	85 %	33.600.000,00	83.600.000,00	83.600.000,00		
7	0	0	2.0	000	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan								
				3		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	33.600.000,00	83.600.000,00	80.258.693,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)
7	0	0	2.0		Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Persentasi hasil koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00		
7	0	0	2.0	000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum								
				1		Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	12.995.300,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta								
				2		Jumlah Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Dipelihara dengan Melibatkan Pihak Swasta	1 Unit	1 Unit	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	90 %	90 %	365.000.000,00	338.600.000,00	338.600.000,00		

						Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan	1 Laporan	14.100.000,00	14.100.000,00	0,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0 1	0 3	2.0 6		Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		
7	0 1	0 3	2.0 6	001 0	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam								
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	50 Keluarga	50 Keluarga	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0 1	0 3	2.0 6	001 1	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga								
						Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	50 Keluarga	50 Keluarga	25.000.000,00	25.000.000,00	11.094.700,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0 1	0 4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	68.400.000,00	68.400.000,00	55.896.750,00		
7	0 1	0 4	2.0 1		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum.	80 %	80 %	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00		
7	0 1	0 4	2.0 1	000 1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6 Laporan	6 Laporan	16.800.000,00	16.800.000,00	7.480.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0 1	0 4	2.0 1	000 2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat								

						Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	18.000.000,00	16.916.750,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Persentase Aparat Keamanan (Linmas) yang Dibina di Bidang Perda dan Perkada	95 %	95 %	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00		
7	0	0	2.0	000	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia								
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	1 Laporan	1 Laporan	33.600.000,00	33.600.000,00	31.500.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penegakan perda yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	90 %	90 %	136.000.000,00	136.000.000,00	108.587.000,00		
7	0	0	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan	95 %	95 %	136.000.000,00	136.000.000,00	136.000.000,00		
7	0	0	2.0	000	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia								
						Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka	150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	47.900.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

					Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia							
7	0 1	0 5	2.0 1	000 4	Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional							
					Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	42.650.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0 1	0 5	2.0 1	000 8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan							
					Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen	36.000.000,00	36.000.000,00	18.037.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0 1	0 6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang dibina dan diawasi	100 %	100 %	53.692.500,00	53.692.500,00	48.897.500,00	
7	0 1	0 6	2.0 1		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Capaian Keberhasilan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85 %	85 %	53.692.500,00	53.692.500,00	53.692.500,00	
7	0 1	0 6	2.0 1	000 3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	7 Dokumen	7 Dokumen	16.957.500,00	16.957.500,00	12.162.500,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)

7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa								
	1	6	1	6		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	0,00	0,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
7	0	0	2.0	000	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa								
	1	6	1	9		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	1 Dokumen	1 Dokumen	36.735.000,00	36.735.000,00	36.735.000,00	Kab. Bandung, Ciwidey, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)
J U M L A H									5.293.563.517,00	5.665.609.409,56	5.681.532.056,00		

BAB V

PENUTUP

5.1. Catatan Penting

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Rencana Kerja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Kecamatan Ciwidey dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Ciwidey serta sebagai acuan dalam menyusun rencana program/kegiatan dan anggaran Kecamatan Ciwidey Tahun 2025. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Ciwidey di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Catatan Penting Yang Perlu Mendapat Perhatian

Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dalam pelaksanaan semua program dan kegiatan harus mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab seluruh Pegawai Kecamatan Ciwidey serta peran aktif stakeholder yang berkepentingan.

b. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan Sebagai Berikut :

1. Kecamatan Ciwidey berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025;

2. Kecamatan Ciwidey berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 dengan berpedoman kepada Renja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025 dan RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Kecamatan Ciwidey Tahun 2025, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2025.

c. Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Ciwidey selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2025 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Ciwidey. Renja Kecamatan Ciwidey juga memberikan umpan balik (feed back) dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang oleh pimpinan sehingga diperoleh peningkatan kinerja kearah yang lebih baik. Semoga keberadaan Renja Kecamatan Ciwidey ini dapat menjadi acuan rencana pembangunan demi tercapainya visi dan misi Kabupaten Bandung serta memberikan manfaat bagi proses perencanaan pembangunan Kabupaten Bandung.

CAMAT CIWIDEY,

ttd

NARDI SUNARDI

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Form E.70
PENGENDALIAN DAN EVALUASI KEBIJAKAN RENJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

No	Dokumen/Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidakesesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
1	2	3	4	5	6
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Informasi.	√			
3	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-perangkat daerah kabupaten tahun lalu berdasarkan Renstra-perangkat daerah.	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
6	Penelaahan Rancangan Awal RKPD.	√			
7	Perumusan tujuan, sasaran, indikator dan target kinerja.	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat.	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas.	√			
10	Pelaksanaan forum perangkat daerah kabupaten.		√		
10a.	Menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah provinsi dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang kecamatan.		√		
10b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.	√			
10c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan.	√			

10d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah sesuai SE Kepala Daerah.	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan perangkat daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.	√			
12.	Program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum perangkat daerah.	√			
13.	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju.	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten yang telah disahkan.	√			

Ciwidey, Juni 2025
CAMAT CIWIDEY

NARDI SUNARDI, SE.,M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700705 199503 1 004